

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menanggulangi praktik pemungutan tarif retribusi parkir ilegal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Praktik parkir ilegal masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), keresahan masyarakat, serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pentingnya kebijakan yang efektif serta bentuk kebijakan yang mampu mengatasi praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi nyata serta efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah belum berjalan efektif, terutama karena lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan belum optimalnya penegakan hukum, selain itu, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi alasan utama praktik tersebut tetap berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih tegas dan terintegrasi melalui peningkatan pengawasan, Sanksi administratif juga harus diterapkan secara konsisten guna memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi, seperti sistem parkir elektronik, untuk meningkatkan transparansi. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perparkiran di Kabupaten Kudus dapat menjadi lebih tertib, transparan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Parkir Ilegal, Retribusi Parkir, Penegakan Hukum, PAD.

ABSTRACT

The Kudus Regency Government's policies to address the practice of collecting illegal parking fees that do not comply with Regional Regulation No. 4 of 2023. Illegal parking practices still occur frequently and cause various problems, such as a decline in Local Own-Source Revenue (PAD), public unrest, and a loss of trust in the local government. Therefore, this study focuses on the importance of effective policies and the types of policies capable of addressing these practices.

The research method used is an empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained through interviews, field observations, and literature reviews. This study utilizes qualitative data sourced from primary and secondary data; data analysis was conducted systematically to describe the actual conditions and the effectiveness of law enforcement against illegal parking practices.

Research findings indicate that local government policies have not been implemented effectively, primarily due to weak oversight, insufficient public awareness campaigns, and suboptimal law enforcement. Additionally, economic factors among the community are a major reason why these practices persist. Therefore, more decisive and integrated measures are needed through enhanced oversight. Administrative sanctions must also be consistently enforced to serve as a deterrent for violators. Furthermore, strengthening inter-agency coordination and utilizing technology, such as electronic parking systems, is essential to enhance transparency. These efforts are expected to help establish a parking system in Kudus Regency that is more orderly and transparent, increase Local Revenue (PAD), and provide a sense of safety and comfort for the community.

Keywords: Local Government Policies, Illegal Parking, Parking Fees, Law Enforcement, Local Government Revenue.